

Analisis Implementasi Pemanfaatan Teknologi Audit Dan Etika Profesi Auditor Dalam Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Sukabumi

Retha Tartila Suwandi¹, Gatot Wahyu Nugroho², Idang Nurodin³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

e-mail: Rethatartila20@gmail.com¹, gatotwahyunu2@gmail.com²,
idangnurodin4@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan teknologi audit dan penerapan etika profesi auditor dalam sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sukabumi, serta bagaimana integrasi keduanya mendukung terciptanya pengawasan yang transparan dan akuntabel. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam dan observasi kepada Kepala Inspektorat, empat auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dan satu informan pendukung dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta data sekunder berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dokumen pengelolaan keuangan desa. Analisis data dilakukan mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan uji keabsahan data melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi telah memanfaatkan teknologi audit berupa SIMPEDES, SIPEKA, dan Microsoft Excel yang mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses pengawasan, meskipun penerapan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) dan data analytics masih terbatas akibat keterbatasan kompetensi SDM, infrastruktur teknologi, dan anggaran. Penerapan etika profesi auditor dijalankan melalui prinsip integritas, objektivitas, independensi, profesionalisme, dan kerahasiaan informasi yang didukung oleh pakta integritas, sistem rotasi penugasan, dan mekanisme deklarasi konflik kepentingan. Integrasi antara teknologi audit dan etika profesi auditor terbukti berperan penting dalam mendukung pengawasan keuangan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip good governance.

Kata Kunci: Teknologi Audit, Etika Profesi Auditor, APIP, Pengawasan Keuangan Desa.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of audit technology utilization and the application of auditor professional ethics within the village financial management supervision

system in Sukabumi Regency, and how the integration of both supports transparent and accountable supervision. This research employs a descriptive qualitative approach with primary data obtained through in-depth interviews and observation of the Head of the Inspectorate, four auditors of the Sukabumi Regency Inspectorate, and one supporting informant from the Village Community Empowerment Agency (DPMD), as well as secondary data in the form of Audit Result Reports and village financial management documents. Data were analyzed using the Miles and Huberman model, comprising data reduction, data display, and conclusion drawing/verification, with data validity tested through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The results show that the Sukabumi Regency Inspectorate has utilized audit technologies such as SIMPEDES, SIPEKA, and Microsoft Excel, which have improved the efficiency and speed of supervision, although the application of Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) and data analytics remains limited due to constraints in human resource competence, technological infrastructure, and budget. The application of auditor professional ethics is carried out through the principles of integrity, objectivity, independence, professionalism, and confidentiality, supported by integrity pacts, an assignment rotation system, and a conflict-of-interest declaration mechanism. The integration of audit technology and auditor professional ethics proves essential in supporting a more transparent, accountable village financial supervision system that is consistent with the principles of good governance.

Keywords : Audit Technology, Auditor Professional Ethics, Government Internal Auditor, Village Financial Supervision.

LATAR BELAKANG

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prinsip dasar penyelenggaraan administrasi publik di Indonesia, mulai dari tingkat pusat, daerah, hingga desa, yang menuntut pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien (Suparji, 2019). Pengelolaan keuangan publik bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan (Ardianti et al., 2025). Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital pada sistem pengawasan dan audit sektor publik. Proses audit yang semula bertumpu pada metode konvensional kini memanfaatkan sistem informasi akuntansi, Computer Assisted Audit Techniques (CAATs), dan data analytics, yang terbukti meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas deteksi anomali dibandingkan metode manual (Miradji et al., 2026). Meski demikian, secanggih apapun teknologi yang digunakan tetap membutuhkan auditor yang memegang teguh prinsip etika profesi, seperti integritas, objektivitas, dan independensi, karena prinsip tersebut menentukan tingkat kepercayaan terhadap hasil audit (Da Costa & Salim, 2025).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan yang luas kepada desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri, termasuk Dana Desa, sehingga meningkatkan kompleksitas dan risiko pengelolaan keuangan desa pada seluruh tahapan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Kondisi ini menuntut sistem pengawasan yang tangguh, yang di tingkat kabupaten diemban oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui Inspektorat Kabupaten, dengan dukungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam fungsi pembinaan (Budianto & Firmansyah, 2025). Di Kabupaten Sukabumi, Inspektorat telah mengambil langkah digitalisasi pengawasan melalui pemanfaatan SIMPEDES (Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Desa), SIPEKA (Sistem Perencanaan Keuangan), dan Microsoft Excel. Namun demikian, sejauh mana teknologi tersebut terintegrasi secara optimal dalam seluruh tahapan audit, serta sejauh mana teknik audit berbasis teknologi seperti CAATs dan data analytics telah diadopsi, masih belum diketahui secara pasti.

Selain dimensi teknologi, kualitas pengawasan juga sangat ditentukan oleh bagaimana etika profesi dihayati dan dipraktikkan oleh auditor APIP dalam keseharian tugasnya. Tekanan lingkungan kerja, kedekatan hubungan antarpihak, serta potensi konflik kepentingan dapat memengaruhi independensi dan objektivitas auditor (Da Costa & Salim, 2025), sementara digitalisasi audit turut memunculkan tantangan baru berupa risiko keamanan data dan ketergantungan pada sistem teknologi. Penelitian terdahulu cenderung mengkaji teknologi audit dan etika profesi auditor sebagai dua aspek yang berdiri sendiri, misalnya Nisaa et al. (2024) yang menyoroti pengaruh teknologi digital terhadap efektivitas audit, dan Da Costa & Salim (2025) yang menekankan penguatan etika profesi di era digitalisasi, namun kajian yang mempertemukan keduanya dalam satu bingkai analisis pada konteks kinerja APIP daerah yang mengawasi keuangan desa masih sangat terbatas. Kesenjangan inilah yang mendasari penelitian ini, dengan tujuan menganalisis implementasi pemanfaatan teknologi audit, penerapan etika profesi auditor, serta integrasi keduanya dalam mendukung sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi di Kabupaten Sukabumi.

Teori pengendalian internal menjelaskan bahwa organisasi memerlukan sistem pengendalian terstruktur guna menjamin tercapainya tujuan secara efektif dan efisien, menjaga keandalan laporan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kerangka COSO mengemukakan lima komponen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (Prihanisetyo, 2023). Di Indonesia, konsep ini diadopsi dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, yang dilaksanakan APIP melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan (Korah et al., 2016). Sejalan dengan itu, prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan penegakan hukum, menjadi tolok ukur keberhasilan pengawasan pengelolaan keuangan publik (Polrendy et al., 2025).

Teknologi audit merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses audit yang mendukung efektivitas, efisiensi, dan kualitas audit (Iqlimah et al., 2024), mencakup sistem informasi akuntansi, software audit, data analytics, dan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs). CAATs sendiri adalah teknik berbasis komputer yang membantu auditor menganalisis data dan menguji pengendalian secara lebih efektif (Yashthafya Thahirah et al., 2025), yang menurut IFAC dapat meningkatkan efektivitas prosedur audit terutama pada kondisi volume transaksi besar. Jenis teknologi audit mencakup Generalized Audit Software (GAS), utility software seperti spreadsheet, test data, Embedded Audit Facilities, hingga data

analytics dan AI. Manfaat pemanfaatannya meliputi peningkatan efisiensi, akurasi, deteksi fraud, dan dukungan transparansi, meskipun implementasinya di sektor publik Indonesia masih dihadapkan pada tantangan kompetensi SDM, infrastruktur, biaya, dan resistensi perubahan (Saputra et al., 2026).

Etika profesi auditor adalah pedoman moral dan kode etik yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan tanggung jawab secara objektif dan independen (Maulana, 2020). Dalam konteks APIP, etika profesi diatur melalui PermenPAN-RB No. 4 Tahun 2008 tentang Kode Etik APIP, yang menekankan integritas, objektivitas, independensi, kompetensi profesional, kerahasiaan, dan profesionalisme. Di era digital, etika profesi menghadapi tantangan baru terkait kerahasiaan dan perlindungan data, ketergantungan pada sistem otomatis, kompetensi teknologi, serta transparansi algoritma (Rahmah & Uli, 2025).

APIP terdiri atas BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota (PP No. 60 Tahun 2008). Berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2020, Inspektorat Kabupaten berwenang melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas pengelolaan keuangan desa, dengan peran meliputi audit keuangan, audit kinerja, audit tujuan tertentu, pembinaan, serta pemantauan tindak lanjut rekomendasi. Pengelolaan keuangan desa sendiri diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

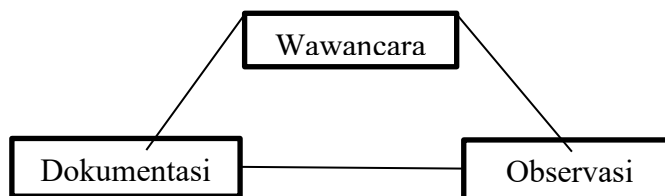
Kerangka berpikir penelitian ini menempatkan pemanfaatan teknologi audit dan penerapan etika profesi auditor sebagai dua pilar yang saling melengkapi dalam mendukung fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai pelaksana APIP. Integrasi kedua pilar tersebut, bukan keberadaannya secara terpisah, diyakini menjadi kunci terwujudnya sistem pengawasan keuangan desa yang transparan, akuntabel, patuh terhadap regulasi, serta efektif dan efisien sebagai wujud nyata good governance.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi teknologi audit dan etika profesi auditor dalam pengawasan keuangan desa (Sugiyono, 2020). Penelitian dilaksanakan di Inspektorat Kabupaten Sukabumi sebagai lokasi pengumpulan data primer, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai informan pendukung. Desa tidak dijadikan sumber data primer, melainkan unit analisis yang dikaji melalui dokumen resmi seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan dokumen tindak lanjut rekomendasi audit.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, terdiri atas Kepala Inspektorat, empat orang auditor Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dan satu informan dari DPMD. Kriteria informan meliputi keterlibatan langsung dalam proses audit atau pengawasan keuangan desa, kewenangan dalam pengawasan, serta pemahaman terhadap pemanfaatan teknologi dalam proses tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam semi terstruktur (60-120 menit per sesi), observasi partisipan pasif terhadap aktivitas pengawasan dan penggunaan teknologi audit, serta studi dokumentasi atas LHP, APBDesa, laporan realisasi anggaran, dan regulasi terkait.

Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dikemukakan Sugiyono (2020), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara manual dengan mengelompokkan data berdasarkan tiga tema utama, yaitu pemanfaatan teknologi audit, penerapan etika profesi auditor, dan integrasi keduanya. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber (membandingkan informasi dari Kepala Inspektorat, auditor, dan DPMD), triangulasi teknik (membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta member check untuk memastikan kesesuaian data dengan maksud informan.



Gambar 3.3 Triangulasi Teknik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi telah memanfaatkan SIMPEDES dan SIPEKA sebagai platform digital utama dalam pengelolaan dan pemantauan data keuangan desa, didukung Microsoft Excel sebagai alat bantu analisis harian. Kepala Inspektorat menyampaikan bahwa kedua sistem tersebut membantu auditor mengakses data keuangan desa secara lebih cepat dan terstruktur dibandingkan metode berbasis dokumen fisik, sehingga proses audit lapangan menjadi lebih terarah. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mencakup seluruh tahapan audit, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan dan pemantauan tindak lanjut, serta memperjelas jejak audit (audit trail).

Meskipun demikian, penerapan Computer Assisted Audit Techniques (CAATs) secara formal, seperti perangkat lunak ACL atau IDEA, masih sangat terbatas, dan sebagian besar analisis data audit masih bertumpu pada spreadsheet yang dikombinasikan dengan SIMPEDES. Auditor senior mengungkapkan bahwa keterbatasan lisensi perangkat lunak dan minimnya pelatihan teknis menjadi hambatan utama, meskipun konsep CAATs dan data analytics telah dipahami secara teoretis. Kendala lain yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kompetensi SDM auditor, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata terutama pada konektivitas internet di wilayah desa, serta belum tersedianya anggaran khusus untuk pengadaan perangkat lunak audit profesional. Di sisi lain, komitmen pimpinan terhadap modernisasi pengawasan, dukungan regulasi pemerintah pusat, dan integrasi SIMPEDES dengan data APBDesa menjadi faktor pendukung yang membuat proses audit tetap sistematis meski tanpa perangkat CAATs khusus.

Temuan ini sejalan dengan Iqlimah et al. (2024) yang menegaskan bahwa teknologi audit telah menjadi komponen integral praktik audit modern, sekaligus mengonfirmasi hambatan yang diidentifikasi Saputra et al. (2026), yaitu keterbatasan kompetensi SDM, infrastruktur, dan biaya investasi sebagai faktor penghambat utama implementasi teknologi

audit di sektor publik. Dari perspektif SPIP, pemanfaatan sistem informasi terintegrasi memperkuat komponen informasi-komunikasi dan pemantauan (PP No. 60 Tahun 2008), memungkinkan APIP melakukan pengawasan yang lebih proaktif.

Penerapan etika profesi auditor di Inspektorat Kabupaten Sukabumi terinternalisasi melalui beberapa mekanisme kelembagaan. Pada aspek integritas dan objektivitas, setiap auditor diwajibkan menandatangani pakta integritas sebelum penugasan dan melaporkan temuan secara jujur tanpa dipengaruhi tekanan pihak manapun, sementara sistem rotasi penugasan diterapkan agar auditor tidak mengaudit desa yang sama secara berturut-turut, didukung mekanisme pengendalian berpasangan (*peer control*) dalam setiap tim audit.

Pada aspek independensi, auditor menghadapi tantangan struktural karena berada dalam satu hierarki birokrasi dengan pihak yang diawasi, serta potensi tekanan sosial akibat kedekatan kultural dengan aparatur desa. Untuk mengatasi hal ini, Inspektorat menerapkan mekanisme deklarasi konflik kepentingan pada setiap awal penugasan, di mana auditor yang memiliki hubungan personal dengan pihak yang diaudit wajib melaporkannya dan dapat digantikan auditor lain. Pada aspek kerahasiaan, akses terhadap SIMPEDES dan dokumen audit dibatasi melalui akun pribadi bersandi yang seluruh aktivitasnya tercatat dalam log sistem, sementara profesionalisme auditor didukung pelatihan rutin dari BPKP dan Kementerian Dalam Negeri serta mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

Temuan ini relevan dengan pandangan Maulana (2020) bahwa etika profesi merupakan pedoman moral yang mengatur perilaku auditor secara objektif dan independen, serta mengonfirmasi tantangan independensi yang diungkap Da Costa & Salim (2025) terkait tekanan lingkungan kerja dan kedekatan hubungan antarpihak. Kesadaran auditor terhadap kerahasiaan data digital turut mengonfirmasi temuan Rahmah & Uli (2025) mengenai tantangan etika baru di era digitalisasi audit, meskipun penerapannya masih memerlukan penguatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan keterkaitan erat antara pemanfaatan teknologi audit dan penerapan etika profesi dalam praktik pengawasan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan Kepala Inspektorat, teknologi membantu auditor bekerja lebih cepat dan akurat, namun tanpa etika yang benar berpotensi disalahgunakan; sebaliknya etika yang baik saja tidak cukup tanpa dukungan sistem yang memadai untuk menghadapi kompleksitas data keuangan desa dalam skala besar. Keberadaan log aktivitas digital pada SIMPEDES memperkuat penerapan etika profesional karena setiap tindakan auditor dalam sistem tercatat secara otomatis, sementara koordinasi antara Inspektorat dan DPMD melalui sistem informasi yang terintegrasi memperkuat fungsi pembinaan yang berjalan paralel dengan fungsi pengawasan.

Temuan ini mengonfirmasi pandangan Nisaa et al. (2024) tentang pengaruh signifikan teknologi digital terhadap efektivitas audit sekaligus pandangan Da Costa & Salim (2025) tentang urgensi penguatan etika profesi di era digitalisasi. Dalam kerangka *good governance*, integrasi kedua pilar tersebut terbukti berkontribusi pada peningkatan transparansi melalui jejak audit digital dan akuntabilitas melalui komitmen etika profesi yang tinggi, menegaskan bahwa teknologi audit dan etika profesi bukan dua elemen yang berdiri

sendiri, melainkan saling menguatkan dalam membentuk sistem pengawasan keuangan desa yang efektif dan efisien.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Sukabumi telah memanfaatkan teknologi audit melalui SIMPEDES, SIPEKA, dan Microsoft Excel yang meningkatkan efisiensi pengawasan, meskipun penerapan CAATs dan data analytics masih terbatas akibat kendala kompetensi SDM, infrastruktur, dan anggaran. Etika profesi auditor telah terinternalisasi melalui integritas, objektivitas, independensi, profesionalisme, dan kerahasiaan, didukung pakta integritas, rotasi penugasan, dan deklarasi konflik kepentingan, meskipun keamanan siber masih perlu diperkuat. Integrasi teknologi audit dan etika profesi terbukti saling melengkapi dalam mewujudkan pengawasan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Disarankan Inspektorat meningkatkan kompetensi CAATs, memperkuat infrastruktur teknologi, dan menyusun kebijakan keamanan siber yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, P. F., Ramadhani, A. D., & Zein, A. W. (2025). Analisis Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah Dalam Meningkatkan Pelayanan Sosial Publik Di Indonesia: Pendekatan Kualitatif. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10).
- Budianto, A., & Firmansyah, A. (2025). Penguatan Peran APIP Dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah. *Akuntansiku*.
- Da Costa, C. A. R., & Salim, S. (2025). Independensi Auditor Dan Tantangan Etika Dalam Era Digitalisasi Audit. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(2), 2023-2036.
- Iqlimah, N., Kanivia, A., & Chandra, A. K. (2024). Dampak Teknologi Informasi Terhadap Proses Dan Kualitas Audit. *Jurnal EBI*, 6(2), 38-46.
- Korah, T., Karamoy, H., & Kalangi, L. (2016). Analisa Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Oleh Inspektorat Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Accountability*, 5(2), 72390.
- Maulana, D. (2020). Pengaruh Kompetensi, Etika Dan Integritas Auditor Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 5(1), 39-53.
- Miradji, M. A., Amalia, A., Salmah, D., Fransisca, E. D., & Lovinawati, E. (2026). Peran Artificial Intelligence Dalam Mendeteksi Fraud: Studi Literatur Pada Praktik Audit Modern. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1), 15026-15034.
- Nisaa, R. K., Bahrim, S. M. S., & Kustiwi, I. A. (2024). Teknologi Digital Dan Transformasi Internal Audit Terhadap Perlakuan Laporan Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(2), 263-277.
- Polrendyo, P., Pramudiana, I. D., & Haryati, E. (2025). How "Good" Governance In Indonesia? A Systematic Literature Review. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(5), 63-86.

- Prihanisetyo, A. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Menggunakan Pendekatan Committee Of Sponsoring Organization Of Treadway Commission (COSO) Pada Piutang Usaha Untuk Mengurangi Risiko Piutang Tak Tertagih. *Madani Accounting And Management Journal*, 9(1), 54-74.
- Rahmah, F., & Uli, R. Y. A. (2025). Audit Internal Dalam Era Transformasi Digital: Identifikasi Tantangan Melalui Tinjauan Literatur. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 8387-8398.
- Saputra, D., Kusuma, H., & Urumsah, D. (2026). Determinants Of Fraud Detection Ability: A Glimpse From Indonesian Auditors. *Global Business & Finance Review*, 31(5), 34.
- Sugiyono, M. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Interpretatif, Interaktif, Dan Konstruktif* (Ed. 3, Cet. 3).
- Suparji, S. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 1-5.
- Yashthafya Thahirah, A., Rahmatillah, A. A., Ombe, I. T., Amalia, N. R., & Hasan Triadi, N. (2025). Dampak Audit Berbasis Teknologi (Computer Assisted Audit Techniques) Terhadap Efektivitas Dan Efisiensi Proses Audit. *RIGGS: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*.